

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DESA SUMBERGONDO KOTA BATU

Implementation of Community Empowerment Policies Through the Micro, Small and Medium Enterprise (MSMEs) Program in Sumbergondo Village Batu City

Yohanes Filkianus Yanto^{1*}

Firman Firdausi¹

Agustinus Ghunu¹

¹Universitas Tribhuwana

Tunggadewi, Malang

*corresponding author:
filkyanus03@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Sumbergondo. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan postpositivisme untuk menggali informasi lebih dalam mengenai kualitas pelayanan pembuatan surat keterangan usaha di Kantor Desa Sumbergondo. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih berdasarkan pengetahuan dan pengalaman terkait topik, seperti Kepala Desa, Kasi Pemberdayaan, dan pelaku UMKM. Data dianalisis dengan mengorganisasi, menjabarkan, dan menyintesis informasi untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Desa Sumbergondo telah berjalan dengan baik. Komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta sikap positif dari pelaksana dan struktur birokrasi yang mendukung, menjadi faktor utama keberhasilan program ini. Meskipun demikian, terdapat hambatan berupa keterbatasan anggaran untuk program pemberdayaan dan keterlambatan regulasi dari Pemerintah Daerah. Program UMKM diharapkan dapat terus berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun ada tantangan yang harus diatasi.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of community empowerment policies through the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Program in improving the economic welfare of the people of Sumbergondo Village. The method used is qualitative with a post-positivistic approach to dig deeper into information about the quality of business certificate making services at the Sumbergondo Village Office. Data collection was carried out through interviews, observations, and documentation with informants selected based on knowledge and experience related to the topic, such as the Village Head, Head of Empowerment, and MSME actors. Data were analyzed by organizing, describing, and synthesizing information to draw conclusions. The results of the study indicate that the implementation of the MSME empowerment policy in Sumbergondo Village has been running well. Effective communication, availability of adequate resources, and a positive attitude from the implementers and a supportive bureaucratic structure are the main factors in the success of this program. However, there are obstacles in the form of limited budget for the empowerment program and delays in regulations from the Regional Government. The MSME program is expected to continue to develop to improve community welfare, although there are challenges that must be overcome.



© year The Authors. Published by **Penerbit Forind**. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment>

Submit: 18-05-2025

Accepted: 13-07-2025

Published: 15-07-2025

PENDAHULUAN

Di Indonesia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu komitmen Pemerintah sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi terutama untuk masyarakat luas di berbagai sektor. UMKM berperan penting dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dengan memfasilitasi lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di berbagai lapisan, terutama di kalangan ekonomi menengah bawah. Mengurangi pengangguran juga UMKM menjadi solusi penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang, terutama di

sektor informal. Menggerakan ekonomi daerah UMKM sangat membantu mengembangkan perekonomian di daerah-daerah, khususnya yang jauh dari pusat-pusat ekonomi besar, dan berkontribusi pada pembangunan daerah.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pendidikan nonformal untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat lebih berkembang melalui suatu peningkatan keterampilan yang dimiliki atau ada (Sucipto & Sutarto, 2015). Pemberdayaan dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat yang meliputi kesejahteraan keluarga, memandirikan masyarakat miskin, mengangkat harkat dan martabat masyarakat lapisan bawah, menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam bertindak. Pemberdayaan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah setempat. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diciptakan suatu program pemberdayaan di pedesaan sehingga mampu mensejahterakan keluarga dan masyarakat. Program pemberdayaan bisa dilakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dalam bentuk pelatihan. Dalam hal ini diperlukan pembinaan-pembinaan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun instansi terkait kepada masyarakat dalam upaya kesejahteraan dan kualitas hidupnya.

Wuryani & Purwiyastuti (2012) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan bentuk dari proses perubahan sosial menuju ke arah masyarakat yang hidup lebih baik dan sejahtera. Salah satu ciri utama dari pemberdayaan adalah menitikberatkan pada peran dan partisipasi masyarakat sejak dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pemeliharaan. Pemerintah dan instansi lain mempunyai tugas sebagai fasilitator dan motivator bagi masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Tujuan yang akan dicapai melalui usaha pemberdayaan masyarakat, adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan (Sutarto, 2007).

Salah satu pembinaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan adalah melalui Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), program ini berkontribusi aktif untuk bisa mengembangkan suatu daerah/wilayah sehingga dapat meningkatkan usahanya serta meminimalisir angka suatu pengangguran di suatu daerah. Usaha ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena itu selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa tahun yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut.

UMKM yang tersebar luas di Indonesia menjadi aset nasional yang potensial dan penting dalam pemerataan pembangunan. Pemberdayaan UMKM tidak hanya menjadi fokus pembangunan pusat tetapi juga bagian dari program pembangunan daerah yang harus dimasukkan dalam perencanaan daerah (Fatimah, 2011). Peran UMKM sangat vital bagi perekonomian Indonesia, dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Data UMKM penting untuk mengetahui kondisi ekonomi, di mana pertumbuhan menunjukkan ekonomi yang membaik, sedangkan penurunan mengindikasikan melemahnya ekonomi. Data ini juga berguna bagi akademisi dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

Istilah "Pemberdayaan Masyarakat" sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mengingat banyak program yang dilaksanakan oleh pemerintah, BUMN, organisasi sosial, dan swasta untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan. Konsep ini berasal dari kata "daya" yang berarti "kekuatan" dan bertujuan memberikan kekuatan kepada kelompok lemah agar dapat hidup mandiri, terutama dalam

memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan (Hamid, 2018). Tujuan utama pemberdayaan adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat agar tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi dan daya saing global. Peningkatan ini mencakup peningkatan derajat, kualitas, keterampilan, dan kemampuan untuk mencapai kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (Syafri, 2018).

Desa Sumbergondo, yang terletak di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, adalah salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM. Dengan lingkungan alam yang indah dan budaya lokal yang kaya, Desa Sumbergondo memiliki berbagai potensi untuk mengembangkan sektor-sektor seperti pariwisata, kerajinan tangan, dan kuliner lokal. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan karena berbagai kendala, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, kurangnya akses ke pasar dan rendahnya kapasitas. Rendahnya kapasitas yang dimaksud adalah masyarakat Desa Sumbergondo pada umumnya merupakan tamatan SMP dan juga SMA sehingga pemerintah perlu memberikan pemberdayaan bagi masyarakat dalam mengembangkan ide-ide kreatif.

Pemerintah Kota Batu menyadari pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan UMKM di wilayahnya, sehingga berbagai kebijakan telah dirancang dan diimplementasikan untuk memberdayakan masyarakat Desa Sumbergondo. Kebijakan tersebut meliputi pelatihan keterampilan produksi, akses terhadap modal usaha, pengembangan infrastruktur, dan promosi produk lokal, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Program Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Sumbergondo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alami, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Metode ini dipilih untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai kualitas pelayanan pembuatan surat keterangan usaha yang dapat memberikan gambaran tentang fenomena yang diteliti. Penelitian dilakukan di Kantor Desa Sumbergondo, Kota Batu, yang sudah menerapkan Program UMKM. Fokus penelitian meliputi tiga sub fokus kualitas pelayanan, yaitu *Responsiveness* (*responsivitas*), *Responsibility* (*responsibilitas*), dan *Accountability* (*akuntabilitas*), berdasarkan Mervinne dalam Hardiansyah (2018). Sumber data utama diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen pemerintah Desa Sumbergondo. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, dengan informan yang dipilih berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mendalam terkait topik penelitian, seperti Kepala Desa Sumbergondo, Kasi Pemberdayaan, dan pelaku UMKM.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi, dengan instrumen utama berupa peneliti itu sendiri, panduan wawancara, catatan lapangan, alat tulis, serta smartphone untuk merekam percakapan dan foto. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi, yang melibatkan penggunaan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Peneliti juga menggunakan *member checking*, meminta informan untuk memeriksa kembali data yang telah diperoleh guna memastikan keakuratan informasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan cara mengorganisasi data, menjabarkannya ke

dalam unit-unit, melakukan sintesis, dan menarik kesimpulan sesuai dengan prosedur analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Sugiyono (2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan publik merupakan proses penting yang menjadi jembatan antara tujuan pemerintah dan realitas di lapangan. Implementasi merupakan serangkaian tindakan terencana dan disengaja untuk mewujudkan tujuan kebijakan secara efektif dan tepat sasaran (Wahab, 2014; Makmur & Thahier, 2016; Setyawan, 2017). Di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji yang memiliki potensi alam dan budaya yang besar, implementasi kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi kunci untuk mentransformasi potensi tersebut menjadi kesejahteraan nyata.

Namun, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya terletak pada perencanaannya, tetapi pada pelaksanaan di lapangan yang kompleks dan dinamis. Penelitian ini menggunakan kerangka teori yang dikemukakan oleh Edward III dalam menganalisis kebijakan UMKM dengan empat elemen kunci, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi Kebijakan

Komunikasi yang efektif adalah fondasi dari implementasi kebijakan yang berhasil. Kebijakan tidak boleh hanya menjadi dokumen statis, melainkan harus seberkan secara jelas, konsisten, dan bebas distorsi kepada target sasaran. Di Desa Sumbergondo, pemerintah desa tampaknya memahami prinsip ini dengan baik. Proses komunikasi diawali secara terstruktur, mulai dari perencanaan dalam RPJMDes hingga alokasi dalam APBDes, yang kemudian disebarluaskan melalui sosialisasi.

Kepala Desa Sumbergondo, Hadi Purwanto menjelaskan, "Proses komunikasi yang kami lakukan adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi mulai dari

tingkat Desa sampai RT. Sosialisasi yang dilakukan lewat Musdes, forum kegiatan RT/RW maupun kegiatan di kasi/kaur."

Pendekatan ini tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga menyentuh aspek praktis yang relevan bagi pelaku UMKM. Imam Mauludi selaku Kasi Kesra menambahkan detail spesifik mengenai materi komunikasi: "Kami melakukan sosialisasi bagaimana cara melakukan pemasaran produk melalui media online seperti instagram, tiktok dan juga facebook." Kejelasan dan relevansi informasi ini dikonfirmasi oleh pelaku UMKM, Mayrita Dwi Ratna, yang merasakan dampak langsung: "Program pemberdayaan dari Desa sangat membantu kami. Kami dilatih untuk pemasaran melalui media online, sehingga penjualan kami juga bisa meningkat."

Dari sini terlihat bahwa komunikasi yang dijalankan bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan sebuah proses transfer pengetahuan yang fungsional dan langsung menjawab kebutuhan para pelaku UMKM, terutama dalam menghadapi pergeseran pasar ke ranah digital.

Sumber Daya Kebijakan

Tidak ada kebijakan yang dapat berjalan tanpa dukungan sumber daya yang memadai, mencakup staf yang kompeten, informasi, wewenang, dan fasilitas, termasuk anggaran. Pemerintah Desa Sumbergondo menunjukkan adanya alokasi sumber daya yang terencana. Anggaran sebesar Rp 231.080.630,00 dialokasikan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dengan sub-bidang UMKM menerima Rp 31.711.532,00 sebagai penyertaan modal.

Imam Mauludi menegaskan pentingnya dukungan ini, "Implementasi dalam bentuk praktik tentunya ada alat pendukung/sarpras yang harus dicukupi oleh pemerintah desa." Namun, di sinilah muncul sebuah paradoks. Di satu sisi, para aparatur desa mengklaim bahwa sumber daya "sudah memadai" dan program "telah dijalankan dengan baik". Di sisi lain, anggaran juga disebut sebagai faktor penghambat.

Hadi Purwanto mengakui, "Terkait faktor penghambat, masih berkaitan di anggaran. Anggaran tidak sepenuhnya diperuntukkan untuk program pemberdayaan masyarakat melalui UMKM. Makanya program harus dilakukan secara bertahap." Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sumber daya dasar telah tersedia dan dialokasikan, jumlahnya masih jauh dari optimal untuk mengakselerasi program secara maksimal. Ketersediaan sumber daya cukup untuk menjalankan program, tetapi belum cukup untuk menciptakan lompatan signifikan, sehingga pemberdayaan berjalan secara inkremental (bertahap).

Dispositioni Kebijakan

Kecakapan dan ketersediaan sumber daya menjadi sia-sia tanpa adanya kemauan dan komitmen dari para pelaksana. Elemen disposisi ini menyoroti sikap dan dedikasi birokrat serta penerimaan dari masyarakat. Di Desa Sumbergondo terlihat adanya keselarasan komitmen antara pemerintah desa dan pelaku UMKM.

Kepala Desa menyatakan dukungannya secara penuh, "Sangat mendukung penuh akan adanya program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kami akan selalu mendukung dengan melihat potensi yang dimiliki oleh masyarakat." Komitmen ini bukan hanya retorika, melainkan diwujudkan dalam tindakan konkret seperti fasilitasi pelatihan, pameran produk saat ulang tahun Kota Batu, hingga upaya mendatangkan investor.

Dukungan ini disambut positif oleh masyarakat. Mayrita Dwi Ratna menegaskan, "Sangat mendukung penuh dengan adanya program pemberdayaan ini... dukungan yang tepat, program seperti ini dapat memberikan manfaat besar." Kesamaan pandangan dan antusiasme dari kedua belah pihak inilah yang menjadi "bahan bakar" utama yang membuat program ini terus berjalan dan dirasakan manfaatnya, meskipun di tengah keterbatasan sumber daya.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang solid dengan pembagian tugas yang jelas dan mekanisme koordinasi yang efektif, menjadi tulang punggung pelaksanaan kebijakan. Di Desa Sumbergondo tanggung jawab utama program ini diemban oleh Kasi Kesra, namun pelaksanaannya tidak bersifat terpisah atau sendiri-sendiri. Hadi Purwanto menjelaskan, "Badan yang bertanggung jawab penuh adalah kasi kesra tetapi kami selalu bekerja sama agar semuanya bisa berjalan sesuai harapan."

Lebih jauh lagi, birokrasi desa tidak bekerja sendiri. Mereka secara proaktif menjalin kerja sama dengan instansi yang lebih tinggi. Imam Mauludi menuturkan, "Kami juga berkerja sama dengan dinas perindustrian dan dinas parawisata... bila ada tamu dari luar daerah kami selalu mengajak dan memperkenalkan produk-produk yang ada di Desa Sumbergondo."

Praktik ini menunjukkan pemahaman bahwa pemberdayaan UMKM adalah isu multi-sektor yang tidak bisa diselesaikan oleh desa saja. Dengan membangun jembatan koordinasi vertikal (dengan dinas terkait) dan horizontal (antar-perangkat desa), mereka menciptakan sebuah ekosistem pendukung yang memperluas jangkauan promosi dan membuka peluang pasar yang lebih besar bagi UMKM lokal.

Faktor Pendukung dan Hambatan Kritis

Keberhasilan implementasi kebijakan di Desa Sumbergondo tidak terlepas dari sinergi beberapa faktor pendukung utama: keterlibatan aktif pemerintah desa, partisipasi antusias dari masyarakat, dan adanya kolaborasi lintas sektor. Faktor-faktor ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM.

Namun, di sisi lain, terdapat tiga hambatan kritis yang berpotensi melambatkan laju perkembangan, diantaranya keterbatasan anggaran: anggaran yang ada bersifat fungsional namun tidak optimal. Keterbatasan ini memaksa program berjalan bertahap dan

menghambat skalabilitas program untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM atau memberikan intervensi yang lebih intensif.

Kesiapan sumber daya Manusia (masyarakat): terdapat resistensi atau pola pikir "merasa puas dengan seadanya" di sebagian masyarakat. Hadi Purwanto mengungkap, "Ketika Pemerintah Desa mau mengusulkan program banyak masyarakat tidak terima karena alasan kebutuhan pasar," padahal pemerintah siap memfasilitasi. Imam Mauludi menambahkan, ide dari masyarakat seringkali bersifat parsial dan tidak matang secara konseptual. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara visi pemerintah desa dengan kesiapan dan pola pikir sebagian masyarakat, yang menjadi tantangan pemberdayaan yang sesungguhnya.

Kendala regulasi: hambatan birokratis muncul dalam bentuk keterlambatan penerbitan peraturan turunan (Perda) dari pemerintah daerah. Keterlambatan ini, menurut Kepala Desa, "menghalangi dasar hukum" terutama terkait dasar penganggaran. Ini adalah masalah klasik dalam administrasi publik di Indonesia, di mana kebijakan pusat tidak segera diikuti dengan payung hukum di daerah, menciptakan ketidakpastian dan memperlambat eksekusi di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan pandangan (Nugroho, 2009; Setyawan (2017) yang menekankan pentingnya formulasi kebijakan derivat atau turunan agar implementasi dapat mencapai tujuannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Sumbergondo, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ini telah memperhatikan empat isu pokok, yaitu komunikasi, sumber daya pendukung, disposisi atau sikap implementator, serta struktur birokrasi. Semua aspek tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa

Sumbergondo, yang terlihat dari komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, sikap positif para pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung. Faktor pendukung utama adalah keterlibatan dan dukungan dari Pemerintah Desa, mulai dari proses sosialisasi hingga melibatkan masyarakat. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat, seperti keterbatasan anggaran untuk program pemberdayaan serta keterlambatan regulasi pendukung dari Pemerintah Daerah yang merupakan turunan kebijakan dari pemerintah pusat.

REFERENSI

- Fatimah, T. (2011). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Menghadapi Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Econosains*, 9(1), 49–61. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/econosains/article/view/551>
- Hardiansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik* (edisi revisi). Gava Media.
- Makmur, & Thahier, R. (2016). *Konseptual dan Konstektual Administrasi dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik*. PT Refika Aditama.
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy*. Gramedia.
- Setyawan, D. (2017). *Pengantar Kebijakan Publik*. Intrans Publishing.
- Sucipto, N. R., & Sutarto, J. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Untuk Meningkatkan Kecakapan Hidup Melalui Kursus Menjahit Di LKP Elisa Tegal. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 4(2), 140.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sutarto, J. (2007). *Pendidikan Nonformal Konsep Dasar Proses Pembelajaran, dan Pemberdayaan*. Unnes Press.
- Syafri, H. S. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat: Strategi dalam Membangun Kemandirian dan Kesejahteraan Sosial*. Prenadamedia Group.

Wahab, S. A. (2014). *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik)*. PT. Bumi Aksara.

Wuryani, E., & Purwiyastuti, W. (2012). Menumbuhkan Peran Serta Masyarakat Dalam Melestarikan Kebudayaan Dan Benda Cagar Budaya Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Wisata Dusun Ceto. *Satya Widya*, 28(2), 147-
<https://doi.org/10.24246/j.sw.2012.v28.i2.p147-154>